

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan** **Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Oleh:**

**Mashudi**

**NPM. 7223800041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

##### HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**Mashudi**

**NPM. 7223800041**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I,    **Dr. Sanusi, S.H., M.H**  NIDN. 0609086202 | Tegal, 15 Januari 2025  Pembimbing II,    **Dr. Mukhidin, S.H., M.H**  NIDN. 0621076101 |
| Mengetahui,    Direktur Pascasarjana,      **Dr Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H**  NIDN. 0606066001 | |

##### PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Sebagai Perbuatan Melawan Hukum” karya:

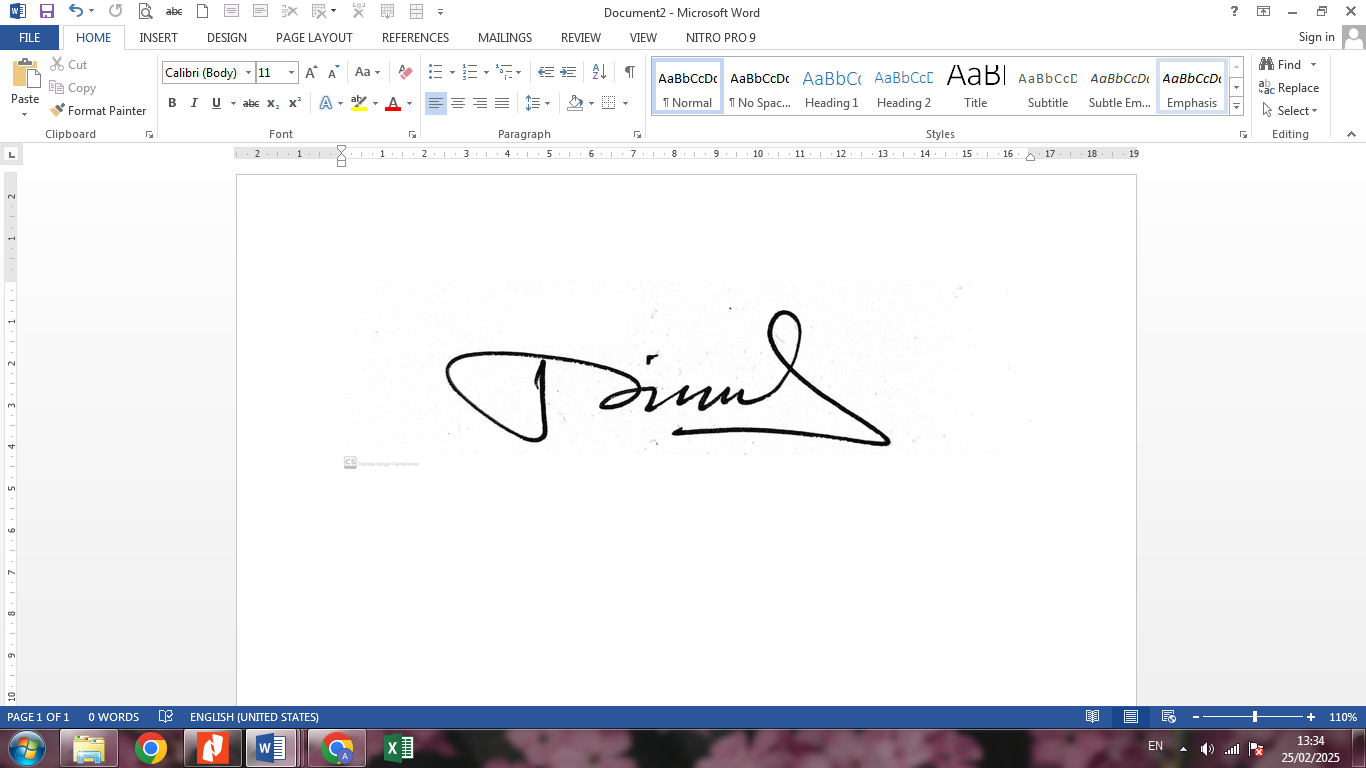
Nama : Mashudi

NPM : 7223800041

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari …………, tanggal …. …………… 2025

Tegal, Januari 2025

Panitia Ujian

Ketua, Sekretaris,

**Dr. Taufiqulloh,S.Pd., M.Hum. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**

NIDN. 0615087802NIDN. 0606066001

Penguji Utama,

**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.**

NIDN. 0617026101

Penguji I, Penguji II,

**Dr. Sanusi, S.H., M.H Dr. Mukhidin, S.H., M.H**

NIDN. 0609086202 NIDN. 0621076101



 Mengetahui,

Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi,

**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

NIDN. 0606066001 NIDN. 0609086202

##### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

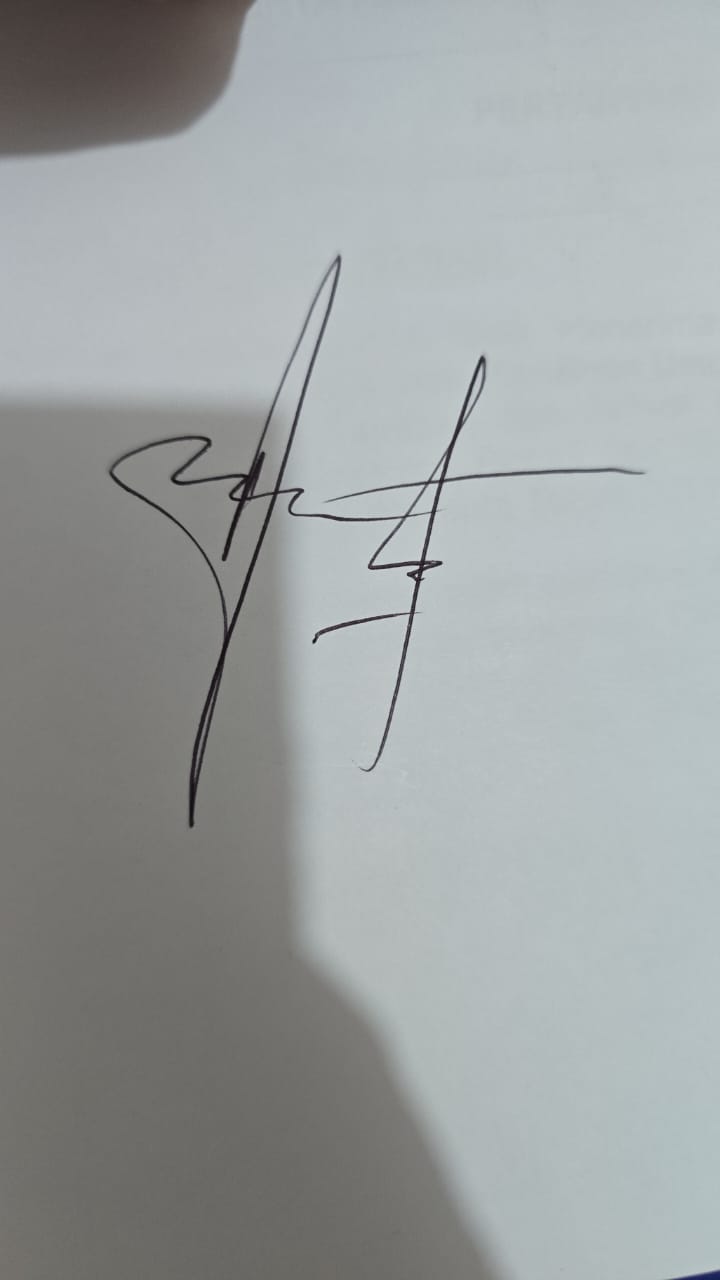
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mashudi

NPM : 7223800041

Jenjang : S2/ Maagister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemui ada yang tidak sesuai, maka saya siap meanggung akibatnya

 Tegal, Januari 2025

Yang menyatakan,



**Mashudi**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penggelapan objek jaminan fidusia yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Perjanjian fidusia yang memberikan hak kepada debitur untuk menguasai objek jaminan sering disalahgunakan dengan mengalihkan atau menggadaikan objek tersebut tanpa persetujuan kreditur yang merupakan perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan penggelapan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan melawan hukum? (2) Bagaimana kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penggelapan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan melawan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penegak hukum serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggelapan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan melawan hukum dapat ditempuh melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan jalur pidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Kendala hukum yang dihadapi meliputi: ketidakjelasan pengaturan tentang sanksi perdata, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan eksekusi putusan pengadilan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar penegak hukum untuk mengoptimalkan penegakan hukum.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Jaminan, Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum.

**ABSTRACT**

This research is motivated by the prevalence of embezzlement cases of fiduciary security objects that cause losses to creditors. Fiduciary agreements that grant rights to debtors to control collateral objects are often misused by transferring or pawning objects without creditor approval, which constitutes an unlawful act. The issues examined are: (1) How is law enforcement against embezzlement of fiduciary security objects as an unlawful act? (2) What are the legal obstacles faced in law enforcement against embezzlement of fiduciary security objects as an unlawful act? This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data was obtained through literature studies and interviews with law enforcement officials and analyzed qualitatively. The results show that law enforcement against embezzlement of fiduciary security objects as an unlawful act can be pursued through civil channels based on Article 1365 of the Civil Code and criminal channels based on Article 36 of the Fiduciary Security Law. Legal obstacles faced include: unclear regulations regarding civil sanctions, lack of understanding of law enforcement officials, difficulties in executing court decisions, and low public legal awareness. Strengthening regulations and coordination between law enforcement agencies is needed to optimize law enforcement.

**Keywords:** law enforcement, fiduciary, security, unlawful act.

##### PERSEMBAHAN

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

* Kedua orang orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
* Istriku tercinta dan anakku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
* Sahabat-sahabatku seperjuangan di Magister Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam penulisan tesis ini.
* Almamater tercinta UPS Tegal.

##### MOTTO

"Tantangan penegakan hukum terbesar abad ini adalah integritas para penegak hukum."

(Mashudi)

"Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan."

(Mochtar Kusumaatmadja)

"Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, namun juga pencapaian nilai-nilai keadilan dalam masyarakat."

(Sudikno Mertokusumo)

"Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Masih banyak faktor yang harus diperhatikan."

(Bagir Manan)

**KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah,* puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Radulullah Saw, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah menetapkan kami sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UPS Tegal.

2. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.H selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kebijakan dan pelayanan akademik selama studi di Pascasarjana UPS Tegal.

3. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Unversitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bimbingan dan bantuan akademik kepada kami selama studi di Magister Ilmu Hukum.

4. Dr. Moh Taufik, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Unversitas Pancasakti Tegal yang telah mendampingi proses belajar di Magister Ilmu Hukum UPS Tegal.

5. Dr. Sanusi, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Dr. Mukhidin, S.H., M.H, M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

6. Segenap Dosen Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.

7. Aulia Sinaga S.Pd dan segenap staff administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya di Magister Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

8. Orang tua, serta teman-teman penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Tegal, Januari 2025

Penulis

Mashudi

**DAFTAR ISI**

Halaman JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN TESIS iii

HALAMAN pernyataan iv

ABSTRAK v

*ABSTRACT* vi

persembahan vii

motto viii

kata pengantar ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Permasalahan 8
3. Tujuan Penelitian 9
4. Manfaat Penelitian 9
5. Originalitas Penelitian 10
6. Kerangka Konseptual 15
7. Metode Penelitian 17
8. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 28

1. Teori Kepastian Hukum 24
2. Teori Perlindungan Hukum 29
   1. Perlindungan Hukum 29
   2. Bentuk Perlindungan Hukum 35
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris 37
   1. Hukum Waris Adat 38
   2. Hukum Waris BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 40
   3. Hukum Waris Islam 43
4. Tinjauan tentang Harta Warisan 46
5. Tinjauan Umum tentang *Legitieme Portie*  48
   1. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah 41
   2. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah 44
6. Tinjauan Umum tentang Wasiat 54
   1. Pengertian Wasiat 54
   2. Syarat-Syarat Wasiat 57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76

1. Pengaturan Legitieme Portie Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam 62
2. Ketentuan Hak Mutlak Ahli Waris terhadap Surat Wasiat yang Menyimpang dari Ketentuan Legitieme Portie 83

BAB IV PENUTUP 115

A. Simpulan 115

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA

**bab i**

**pendahuluan**

##### Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia telah mendorong peningkatan kebutuhan akan pembiayaan yang lebih fleksibel dan aksesibel. Dalam konteks ini, jaminan fidusia muncul sebagai salah satu instrumen hukum yang vital dalam memfasilitasi transaksi pinjaman dan pembiayaan. Diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminan ini memungkinkan debitur untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan, sementara kreditur memperoleh hak kepemilikan secara fidusia. Fleksibilitas ini telah menjadikan jaminan fidusia sebagai pilihan populer dalam berbagai transaksi bisnis dan keuangan di Indonesia. (Badrulzaman, 2010).

Jaminan fidusia merupakan suatu bentuk jaminan kebendaan di mana hak kepemilikan atas suatu objek berpindah dari pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor), sementara objek tersebut tetap berada dalam penguasaan fisik pemberi fidusia. Tujuan jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam hal debitor gagal memenuhi kewajibannya. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, dan dapat diterapkan pada berbagai jenis benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Setelah kewajiban debitor dilunasi, hak kepemilikan benda yang dijaminkan akan kembali kepada debitor. (Dewaweb, 2022)

Dibalik fleksibilitas dan manfaat yang ditawarkan oleh jaminan fidusia, terdapat risiko penyalahgunaan yang signifikan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling menonjol dan berpotensi merugikan adalah tindakan penggelapan objek jaminan fidusia oleh debitur. Tindakan ini tidak hanya melanggar perjanjian antara debitur dan kreditur, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggelapan objek jaminan fidusia dapat manifes dalam berbagai bentuk, termasuk penjualan tanpa izin, penggadaian kepada pihak ketiga, atau pengalihan kepemilikan secara ilegal. Perbuatan melawan hukum dalam menggelapkan jaminan fidusia terjadi ketika debitor atau pihak ketiga dengan sengaja mengalihkan, menjual, atau menggunakan objek jaminan fidusia tanpa izin dari penerima fidusia (kreditor), yang merupakan pelanggaran terhadap hak kreditor. Tindakan ini melanggar Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa debitor dilarang untuk mengalihkan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. (Aziz, 2019)

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia mengatur tentang tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Unsur-unsur dalam pasal ini mencakup adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, serta adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks penggelapan objek jaminan fidusia, penerapan Pasal 1365 dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi jika debitur atau pihak lain yang menguasai objek fidusia dengan sengaja menggelapkan atau menyalahgunakan barang yang dijaminkan, sehingga merugikan kreditur. (Gunawan, 2018)

Dalam kasus penggelapan objek jaminan fidusia, kreditur yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan pasal ini dengan menunjukkan bahwa tindakan penggelapan tersebut melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihaknya. Penggelapan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai tindakan melawan hukum dan harus menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan tersebut dengan kerugian yang timbul. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPer memberikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dan mengembalikan hak kreditur atas objek fidusia yang telah digelapkan.

Implikasi dari tindakan penggelapan objek jaminan fidusia sangat luas dan merugikan. Bagi kreditur, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya jaminan atas pinjaman yang diberikan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional mereka. Dari perspektif yang lebih luas, praktik ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem jaminan fidusia, yang berpotensi menghambat arus kredit dan investasi dalam perekonomian. Selain itu, tindakan penggelapan juga menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu integritas sistem hukum jaminan di Indonesia. Meskipun kerangka hukum yang ada telah menyediakan landasan untuk menangani kasus-kasus penggelapan objek jaminan fidusia, penegakan hukum dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas dalam pembuktian seringkali menjadi hambatan utama, terutama ketika objek jaminan telah berpindah tangan beberapa kali atau telah dimodifikasi. Selain itu, ketidakjelasan dalam interpretasi hukum dan variasi dalam praktik peradilan di berbagai wilayah Indonesia juga berkontribusi pada inkonsistensi dalam penanganan kasus-kasus serupa. (Hanifah, 2017)

Berikut terdapat 5 contoh kasus beserta putusan pengadilan Indonesia terkait Penegakan Hukum terhadap Tindakan Penggelapan Objek Jaminan Fidusia sebagai Perbuatan Melawan Hukum diantaranya:

1. Kasus PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk vs. Tn. Ahmad (2015) Putusan: Mahkamah Agung Nomor 1746 K/Pdt/2015 Ringkasan: Tergugat (Tn. Ahmad) terbukti menggelapkan objek jaminan fidusia berupa mobil. Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tingkat bawah yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk mengembalikan objek jaminan atau membayar ganti rugi.
2. Kasus Bank Mandiri vs. PT. Tiara Marga Trakindo (2013) Putusan: Mahkamah Agung Nomor 2447 K/Pdt/2013 Ringkasan: PT. Tiara Marga Trakindo terbukti mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan Bank Mandiri. Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan tergugat untuk membayar ganti rugi.
3. Kasus BCA Finance vs. CV. Karya Mandiri (2016) Putusan: Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2016/PT.DKI Ringkasan: CV. Karya Mandiri terbukti menjual objek jaminan fidusia berupa alat berat tanpa izin BCA Finance. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi serta biaya perkara.
4. Kasus PT. Astra Sedaya Finance vs. Tn. Budi (2014) Putusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Ringkasan: Tergugat (Tn. Budi) terbukti menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin PT. Astra Sedaya Finance. Pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk mengembalikan objek jaminan dalam keadaan semula.

Perkembangan teknologi dan munculnya berbagai skema pembiayaan baru juga menimbulkan tantangan tambahan dalam penegakan hukum terkait jaminan fidusia. Transaksi online dan penggunaan aset digital sebagai jaminan, misalnya, menciptakan kompleksitas baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam pendekatan penegakan hukum untuk menghadapi realitas kontemporer. Lebih lanjut, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan implikasi hukum dari jaminan fidusia juga menjadi faktor yang mempersulit penegakan hukum. Banyak debitur yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mengalihkan atau menggelapkan objek jaminan fidusia. Di sisi lain, beberapa kreditur juga mungkin tidak menyadari pentingnya prosedur pendaftaran dan eksekusi yang benar dalam menjamin hak-hak mereka. (Hutapea, 2014)

Dalam konteks ini, penelitian mendalam tentang penegakan hukum terhadap tindakan penggelapan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan melawan hukum menjadi sangat relevan dan krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi celah-celah dalam implementasinya, serta merumuskan strategi komprehensif untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang ini. Melalui analisis kasus-kasus terkini dan studi komparatif dengan yurisdiksi lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam menangani kompleksitas penegakan hukum jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi sosial dan ekonomi dari tindakan penggelapan objek jaminan fidusia. Hal ini mencakup analisis dampak terhadap iklim investasi, kepercayaan dalam sistem keuangan, serta efek riak pada sektor-sektor ekonomi terkait. Dengan memahami konsekuensi yang lebih luas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk formulasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merekomendasikan peran serta tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindakan penggelapan objek jaminan fidusia. Ini meliputi peran lembaga penegak hukum, institusi keuangan, notaris, serta masyarakat umum. Dengan pendekatan holistik ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi dengan jaminan fidusia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem hukum dan praktik penegakan hukum terkait jaminan fidusia di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang lebih aman, kondusif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan negara

##### Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan penggelapan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penggelapan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan melawan hukum?

##### Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindakan penggelapan objek jaminan fidusia dan menilai bagaimana hukum yang berlaku dapat mencegah perbuatan melawan hukum tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala-kendala utama dalam proses penegakan hukum terhadap penggelapan objek jaminan fidusia serta mengusulkan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan hukum

##### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis. Manfaat dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap penggelapan objek jaminan fidusia serta konsep-konsep hukum terkait
2. Manfaat Praktis
3. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi mengenai prosedur dan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus penggelapan objek jaminan fidusia, sehingga membantu aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan proses penyidikan dan penuntutan.
4. Bagi Kreditur dan Pelaku Bisnis, Penelitian ini dapat memberikan pedoman dan solusi bagi kreditur dan pelaku bisnis dalam mengelola dan melindungi jaminan fidusia mereka, serta memberikan informasi yang berguna tentang langkah-langkah preventif dan hukum yang dapat diambil jika terjadi penggelapan

##### Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Pembahasan ini akan diketahui sisi-sisi yang membedakan dan diketahui pula letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”. Adapun beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 1. Originalitas Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Judul Penelitian, Nama Peneliti, Tahun Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
| 1 | **"Implementasi Jaminan Fidusia dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum di Indonesia"** *Penulis:* Rizky Ahmad, Fadilah Wulandari *Nama Jurnal:* Jurnal Hukum & Pembangunan *Tahun Terbit:* 2021 *Volume:* 51 *Issue:* 1 | Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi jaminan fidusia di Indonesia sering menghadapi masalah perbuatan melawan hukum, terutama penggelapan dan penipuan. Penulis menemukan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan banyak kasus penggelapan tidak tertangani dengan baik. Rekomendasi penelitian ini meliputi perlunya perbaikan dalam regulasi dan sistem administrasi fidusia | Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi efektifitas penegakan hukum atas penggelapan objek fidusia, dan menganalisa solusi hukum atas perbuatan melawan hukum berupa penggelapan objek fidusia sebagai perbuatan melawan hukum |
| 2 | **Artikel: "Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan Jaminan Fidusia di Indonesia"** *Penulis:* Arief Budiman, Siti Nurhayati *Nama Jurnal:* Jurnal Penelitian Hukum *Tahun Terbit:* 2020 *Volume:* 19 *Issue:* 2. | Penelitian ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap penggelapan jaminan fidusia menghadapi banyak tantangan, termasuk kekurangan bukti dan permasalahan dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam pengumpulan bukti dan pelatihan bagi penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus fidusia | Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi efektifitas penegakan hukum atas penggelapan objek fidusia, dan menganalisa solusi hukum atas perbuatan melawan hukum berupa penggelapan objek fidusia sebagai perbuatan melawan hukum |
| 3 | **"Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Kasus Penggelapan Jaminan Fidusia: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya"** *Penulis:* Andi Prasetyo, Eliza Kusuma *Nama Jurnal:* Jurnal Hukum dan Ekonomi *Tahun Terbit:* 2022 *Volume:* 14 *Issue:* 3 | Penelitian ini menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur yang menjadi korban penggelapan jaminan fidusia. Penulis menemukan bahwa banyak kreditur tidak mendapatkan perlindungan yang memadai karena ketidakjelasan dalam peraturan dan kurangnya dukungan hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi dalam peraturan dan prosedur pengadilan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur | Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi efektifitas penegakan hukum atas penggelapan objek fidusia, dan menganalisa solusi hukum atas perbuatan melawan hukum berupa penggelapan objek fidusia sebagai perbuatan melawan hukum |

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti pada umumnya membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian fidusia.Sedangkan penelitian ini, penulisakan fokus menganalisa terkait penegakan hukum terhadap tindak penggelapan objek jaminan fidusia sebagai klasifikasi perbuatan melawan hukum.

##### Kerangka Konseptual

**Penegakan hukum** adalah proses di mana aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara diimplementasikan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, kelompok, atau institusi mematuhi hukum yang berlaku, baik melalui tindakan pencegahan, penegakan sanksi, maupun penyelesaian sengketa. Dalam teori hukum, penegakan hukum tidak hanya sebatas tindakan represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran. (Ali, 2009).

Secara konseptual, penegakan hukum bertumpu pada tiga elemen utama: aturan hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Aturan hukum adalah dasar dari semua proses penegakan. Dalam sistem hukum yang ideal, hukum disusun berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Aturan-aturan tersebut harus jelas, dapat dipahami oleh masyarakat, dan diimplementasikan secara konsisten. Tanpa aturan hukum yang jelas, penegakan hukum dapat menjadi sewenang-wenang. Aparat penegak hukum mencakup institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Kepolisian bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan menindak pelanggaran hukum di tahap awal. Kejaksaan berperan sebagai pihak yang menuntut pelaku pelanggaran hukum, sementara lembaga peradilan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang ada dan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan integritas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum agar keadilan dapat terwujud.

Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek dari penegakan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam mematuhi dan menegakkan aturan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan adil. Selain itu, masyarakat berperan dalam memberikan dukungan dan legitimasi terhadap tindakan aparat penegak hukum. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan realitas sosial. Dalam banyak kasus, hukum yang baik di atas kertas tidak selalu dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Faktor-faktor seperti korupsi, kurangnya sumber daya, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi penghambat utama dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi institusional sering diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum.

Di samping itu, penegakan hukum juga menghadapi tantangan dalam konteks pluralisme hukum. Dalam masyarakat yang memiliki beragam sistem hukum, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, sering kali terjadi konflik antara norma-norma tersebut. Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika sosial dan budaya agar dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana. Penegakan hukum yang adil harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Sebagai bagian dari negara hukum, aparat penegak hukum harus menjamin bahwa setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial. Prinsip due process of law, yang mengedepankan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil, harus ditegakkan dalam setiap tahap penegakan hukum.

Selain aspek teknis dan legal, penegakan hukum juga bersifat politis. Keputusan-keputusan dalam proses penegakan hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Dalam beberapa kasus, hukum digunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak-pihak tertentu atau untuk melindungi kepentingan elite penguasa. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik harus bebas dari intervensi politik dan didasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip hukum. Peran media dan opini publik juga tidak bisa diabaikan dalam penegakan hukum. Media sering kali berperan sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum dan menjadi saluran untuk menyuarakan ketidakadilan. Namun, pengaruh media harus diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai agar tidak terjadi trial by the media, di mana opini publik menentukan keputusan hukum sebelum proses peradilan selesai. Pada akhirnya, tujuan utama dari penegakan hukum adalah terciptanya keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang efektif dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selalu dikaji dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

**Jaminan fidusia** merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor dalam transaksi utang-piutang. Jaminan ini melibatkan pemindahan hak kepemilikan benda dari debitor kepada kreditor secara fidusia, yaitu berdasarkan kepercayaan, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan fisik debitor. Jaminan fidusia memiliki karakteristik unik, karena meskipun hak kepemilikan berpindah kepada kreditor, debitor tetap dapat menggunakan benda yang dijaminkan selama ia memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor. Secara konseptual, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang menyerahkan hak kepemilikan secara kepercayaan. Dalam konteks ini, benda yang menjadi objek jaminan fidusia bisa berupa benda berwujud, seperti kendaraan atau mesin, serta benda tidak berwujud, seperti piutang atau hak atas merek dagang.

Jaminan fidusia muncul sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi bisnis modern yang memerlukan fleksibilitas. Dalam banyak kasus, debitor masih membutuhkan benda yang dijaminkan untuk mendukung aktivitas bisnis atau kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, konsumen yang membeli kendaraan dengan cara kredit dapat tetap menggunakan kendaraan tersebut, meskipun hak kepemilikannya berada di tangan kreditor sampai kewajiban pembayaran lunas. Hal ini memberikan keleluasaan bagi debitor tanpa mengurangi perlindungan hak kreditor. (Arifin, 2020)

Pemberian jaminan fidusia memerlukan proses pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor. Dengan mendaftarkan fidusia, kreditor memperoleh hak prioritas dalam hal debitor tidak mampu membayar utang. Artinya, jika debitor mengalami kebangkrutan, kreditor fidusia memiliki hak terlebih dahulu untuk mengambil objek jaminan dan menjualnya guna melunasi utang. Ini memberikan kreditor rasa aman dalam memberikan pinjaman atau fasilitas kredit. Dalam hal hak dan kewajiban, kreditor memiliki hak untuk menjual benda yang dijaminkan jika debitor tidak memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Sementara itu, debitor berkewajiban menjaga dan merawat benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan baik, serta tidak boleh mengalihkan atau menjual benda tersebut tanpa izin tertulis dari kreditor. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. (Fahri, 2021)

Meskipun hak kepemilikan benda secara hukum berada pada kreditor, dalam praktiknya, debitor tetap bertanggung jawab secara fisik atas pemeliharaan dan penggunaan benda tersebut. Ini berarti, debitor harus memastikan bahwa benda yang dijaminkan tetap dalam kondisi yang layak, agar nilai objek jaminan tidak berkurang. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan objek jaminan, hal ini bisa menjadi pelanggaran terhadap perjanjian fidusia dan kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi. Di sisi lain, jaminan fidusia juga memiliki potensi risiko, terutama bagi kreditor. Risiko utama dalam sistem jaminan ini adalah jika debitor tidak mematuhi ketentuan yang ada, misalnya dengan menjual atau memindahtangankan benda yang menjadi objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditor. Meskipun undang-undang memberikan sanksi terhadap tindakan semacam ini, dalam praktiknya, kreditor sering kali harus melalui proses hukum yang panjang untuk menegakkan haknya.

Jaminan fidusia juga terkait erat dengan prinsip kepercayaan antara kreditor dan debitor. Sebagai bentuk jaminan yang berbasis pada kepemilikan secara yuridis, kreditor harus percaya bahwa debitor akan mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Ketidakpatuhan debitor dapat merusak hubungan antara kedua belah pihak dan mengarah pada konflik hukum. Oleh karena itu, perjanjian fidusia harus dibuat secara rinci, mencakup hak dan kewajiban kedua pihak untuk meminimalisir potensi sengketa. Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa jaminan fidusia tidak hanya terbatas pada transaksi kredit konsumtif, tetapi juga sering digunakan dalam dunia usaha untuk pembiayaan modal kerja atau investasi. Dalam konteks ini, perusahaan dapat memberikan fidusia atas piutang dagang, inventaris, atau aset lainnya sebagai jaminan kepada kreditor. Dengan demikian, jaminan fidusia memiliki peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan akses ke pembiayaan bagi individu maupun perusahaan. Secara keseluruhan, jaminan fidusia memberikan mekanisme yang fleksibel dan aman dalam transaksi kredit. Dengan adanya peraturan yang jelas dan proses pendaftaran yang terstruktur, fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditor, sekaligus tetap memungkinkan debitor untuk menggunakan benda yang dijaminkan. Namun, efektivitas jaminan fidusia sangat bergantung pada kepatuhan debitor terhadap perjanjian dan kemampuan kreditor untuk menegakkan hak-haknya jika terjadi pelanggaran.

**Perbuatan melawan hukum** adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hak orang lain atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perspektif hukum, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenai sanksi, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Konsep ini berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan tanggung jawab seseorang atas tindakan yang merugikan orang lain. Secara tradisional, dalam hukum perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ini dikenal dengan istilah \*onrechtmatige daad\* dalam terminologi hukum Belanda. Agar suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, ada kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga melanggar norma sosial, adat, moral, dan prinsip umum lainnya yang diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangan hukum modern, Mahkamah Agung Indonesia juga memperluas konsep perbuatan melawan hukum ini, termasuk perbuatan yang melanggar kewajiban sosial atau norma kepatutan yang seharusnya dihormati dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum biasanya terkait dengan tindakan kriminal yang dilarang secara tegas oleh undang-undang, seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Dalam konteks ini, pelaku perbuatan melawan hukum dikenai sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, yang berfokus pada ganti rugi atau kompensasi terhadap korban, hukum pidana bertujuan untuk menghukum pelaku dan mencegah terulangnya tindakan tersebut.

Salah satu elemen penting dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan harta benda atau penghasilan, maupun kerugian immateriil, seperti rasa sakit, penderitaan, atau kerugian reputasi. Untuk mengklaim adanya perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul juga merupakan unsur yang sangat penting. Dalam hal ini, korban harus menunjukkan bahwa tanpa adanya tindakan pelaku, kerugian yang mereka alami tidak akan terjadi. Jika tidak ada hubungan kausal yang jelas, maka tidak dapat dikatakan bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, prinsip kausalitas memainkan peran kunci dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam kasus perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik hukum, perbuatan melawan hukum sering kali menjadi dasar bagi tuntutan ganti rugi dalam kasus-kasus perdata. Contoh klasik adalah ketika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pihak lain, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Perbuatan melawan hukum juga sering dijadikan dasar dalam kasus sengketa kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan tindakan yang merugikan lingkungan. Selain itu, konsep perbuatan melawan hukum juga relevan dalam ranah tanggung jawab profesional. Misalnya, seorang dokter yang melakukan malpraktik atau pengacara yang gagal memberikan nasihat hukum yang tepat dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus-kasus ini, profesional yang bersangkutan dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum dan mengganti kerugian yang dialami oleh klien atau pasien mereka.

Perkembangan teknologi dan globalisasi juga memperluas cakupan perbuatan melawan hukum. Tindakan seperti pencurian data, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi palsu (hoaks) melalui internet kini diakui sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi, serta beradaptasi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Kesimpulannya, perbuatan melawan hukum adalah konsep yang sangat luas dalam hukum, mencakup tindakan yang tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga norma-norma sosial, moral, dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Konsep ini memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta memberikan mekanisme bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami. Dalam konteks yang lebih luas, perbuatan melawan hukum juga mencerminkan tanggung jawab sosial setiap individu untuk menghormati hak dan kepentingan orang lain

##### Kerangka Teori

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting apabila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Teori hukum adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas karena secara murni. Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. **Teori hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum (*grand theory*), teori penegakan hukum (*middle theory*), teori perbuatan melawan hukum (*applied theory*)**.

*Grand Theory* menggunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*) dari Friedrich Julius Stahl sebagai landasan utama penelitian menekankan bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Teori ini mengandung empat elemen penting yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi negara. Dalam konteks penelitian, teori ini relevan karena menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia. Penggelapan objek jaminan fidusia merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Implementasi teori ini menuntut adanya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum.

*Middle Theory* menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto digunakan sebagai teori penghubung yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Teori ini mengidentifikasi lima faktor yaitu hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum terhadap penggelapan objek jaminan fidusia. Dalam praktiknya, teori ini membantu menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus penggelapan fidusia. Teori ini juga memberikan kerangka untuk memahami kompleksitas penegakan hukum dalam kasus fidusia.

*Applied Theory* menggunakan teori perbuatan melawan hukum dari Molengraaff sebagai teori terapan yang secara spesifik menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Teori ini menekankan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks penggelapan objek jaminan fidusia, teori ini membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran dan pertanggungjawaban hukumnya. Teori ini juga menjadi dasar untuk menentukan bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur. Penerapan teori ini memberikan landasan untuk menganalisis aspek keperdataan dari penggelapan objek jaminan fidusia.

##### Metode Penelitian

* + 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau juga disebut penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

* + 1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pendekatan perundang- undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensif* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma- norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan (Irwansyah, 2022). Adapun pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.

* + 1. **Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting* (Waluyadi dan Leliya, 2022). Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.

Data sekunder di bidang hukum dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

* + - * 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang- undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia

* 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

* 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Situs internet yang berkaitan dengan Fidusia

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif ada empat teknik untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu studi kepustakaan, wawancara, angket dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Kedudukan Hukum *Artificial Intelgence* pada karya intelektual

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Analisis dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Pengamatan tidak mungkin tanpa analisis dan tafsiran untuk mengetahui apa maknanya. Analisis dilakukan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh.

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Fokus masalah pada penelitian kualitatif sama kedudukannya dengan rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Fokus masalah dibuat oleh peneliti agar masalah yang akan diteliti lebih sederhana dan tidak mengambang. Dengan demikian peneliti dapat lebih terarah dan lebih fokus sehingga memudahkan untuk menjawab masalah yang diteliti melalui analisis data yang diakhiri dengan kesimpulan

##### Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian tesis ini, pembahasan materi selanjutnya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan di dalam masing-masing bab yang dimaksud secara substansial

**BAB I** **PENDAHULUAN**. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, teori hukum, tinjauan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**. Bab ini berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang hukum jaminan, tinjauan umum tentang fidusia, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindakan penggelapan objek jaminan fidusia sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana kendala yang yang dihadapi dalam penegakan hukum penggelapan objek jaminan fidusia.

**BAB IV PENUTUP.** Penutup merupakan bagian terakhir dan memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berisikan saran-saran dari permasalahan.

**bab iI**

**TINJAUAN PUSTAKA**

##### Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

* 1. **Definisi Penegeakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dalam masyarakat. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance atau pemeliharaan kedamaian. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum atau undang-undang. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. (Abdulkadir Muhammad, 2010)

Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai subjek secara bersama-sama. Sistem ini mencakup aparatur penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Selain itu, sistem penegakan hukum juga melibatkan berbagai lembaga pendukung seperti lembaga pemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum sebagai subjek hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua elemen dalam sistem tersebut. (Wirjono Prodjodikoro, 1981)

Penegakan hukum memiliki tiga aspek penting yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum berkaitan dengan tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Keadilan menjadi aspek yang sangat fundamental karena merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. (Sudikno Mertokusumo, 2010)

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal seperti kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Tantangan juga dapat muncul dari faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2011)

Keberhasilan penegakan hukum akan membawa dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat yang tertib hukum akan menciptakan stabilitas sosial dan keamanan yang kondusif. Penegakan hukum yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pembangunan nasional di berbagai bidang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menjadi prioritas dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

* 1. **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum atau peraturan itu sendiri. Substansi hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat ditegakkan dengan baik. Peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan dapat menghambat proses penegakan hukum. Kualitas peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi. (Sudikno Mertokusumo, 2010)

Faktor aparat penegak hukum yang meliputi institusi dan petugas yang menjalankan penegakan hukum. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Profesionalisme dan kompetensi penegak hukum harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Kesejahteraan aparat penegak hukum juga perlu diperhatikan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus berjalan dengan baik untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu. (Sudikno Mertokusumo, 2011)

Faktor berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum. Teknologi informasi dan komunikasi modern harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Anggaran yang cukup juga diperlukan untuk membiayai operasional penegakan hukum. Dana yang terbatas dapat menghambat optimalisasi penegakan hukum di lapangan. (Adami Chazawi, 2005)

Faktor kesadaran hukum masyarakat yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Budaya hukum yang positif perlu ditumbuhkan sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting sebagai kontrol sosial. Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. (Adami Chazawi, 2005)

Faktor budaya yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan menyikapi hukum. Nilai-nilai budaya lokal dapat mendukung atau menghambat penegakan hukum di suatu daerah. Kebiasaan dan tradisi masyarakat perlu dipertimbangkan dalam implementasi penegakan hukum. Perubahan sosial dan modernisasi juga membawa pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam menyelaraskan penegakan hukum dengan nilai-nilai budaya yang ada.

* 1. **Sistem Penegakan Hukum**

Sistem penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terorganisir untuk menjamin tegaknya hukum dalam masyarakat. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan bekerja sama secara sinergis. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam upaya menegakkan hukum. Keberhasilan sistem penegakan hukum bergantung pada keterpaduan dan koordinasi antar komponen. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Adami Chazawi, 2005)

Komponen utama dalam sistem penegakan hukum di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

1. **Kepolisian** bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Dalam **Pasal 1 angka 5 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka.
2. **Kejaksaan** berperan sebagai penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**. Selain itu, **Pasal 1 angka 7 KUHAP** mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan guna diperiksa dan diputus oleh hakim.
3. **Pengadilan** berfungsi sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan fakta hukum yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. **Lembaga Pemasyarakatan** bertugas melaksanakan pembinaan terhadap para terpidana, sesuai dengan **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina warga binaan agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman.
5. **Advokat atau pengacara** memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum serta mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap proses hukum, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 54 KUHAP**, yang menyatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Peran advokat juga diatur dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, khususnya **Pasal 1 ayat (1)**, yang mendefinisikan advokat sebagai seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan adanya keterpaduan peran dari seluruh komponen ini, sistem penegakan hukum dapat berjalan secara efektif guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sistem penegakan hukum juga didukung oleh berbagai lembaga pendukung yang memiliki fungsi khusus. Lembaga forensik berperan dalam memberikan keterangan ahli dan pembuktian ilmiah. Lembaga bantuan hukum membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses keadilan. Komisi-komisi khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu seperti korupsi atau hak asasi manusia. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim. Sistem ini juga melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan.

Mekanisme kerja sistem penegakan hukum mengikuti prosedur dan tahapan yang telah diatur dalam hukum acara. Proses dimulai dari penyelidikan untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana. Tahap penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Penuntutan dilakukan dengan membuat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Proses persidangan dilakukan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti yang ada.

Sistem penegakan hukum harus mampu menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ini harus berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai aturan. Evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Keberhasilan sistem penegakan hukum akan menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

* 1. **Lembaga Penegakan Hukum**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Polri berwenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana. Polri juga berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan. Institusi kepolisian tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga sektor untuk menjamin tegaknya hukum dan terpeliharanya keamanan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jaksa berperan sebagai penuntut umum yang mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa di pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, kejaksaan juga memiliki wewenang dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menciptakan sistem peradilan yang terpadu.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tinggi negara dan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. MA membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memiliki berbagai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Para hakim di MA bertugas memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan dengan berpedoman pada prinsip keadilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, MA juga melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Sesuai dengan **Pasal 6** undang-undang tersebut, KPK memiliki tugas utama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang menjadi kewenangannya.

Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 9**. Selain itu, sesuai dengan **Pasal 13**, KPK juga berperan dalam melakukan upaya pencegahan korupsi, termasuk pendidikan dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum. Sebagai lembaga yang bersifat independen, KPK bekerja secara bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 3**, yang menyatakan bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau kepentingan tertentu.

Advokat atau pengacara merupakan profesi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**. Advokat bertugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, serta mewakili dan mendampingi klien baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara pidana, sesuai dengan **Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, setiap tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam proses pemeriksaan, dan advokat berperan untuk memastikan hak-hak kliennya terlindungi. Sementara itu, dalam perkara perdata, advokat berperan sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan hukum kliennya dalam penyelesaian sengketa di pengadilan maupun melalui jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

Profesi advokat dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan mandiri, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat**, yang menyatakan bahwa advokat berhak memberikan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, advokat wajib memegang teguh kode etik profesi serta sumpah advokat dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 26** undang-undang yang sama. Untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, para advokat juga tergabung dalam organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28**, yang menyebutkan bahwa hanya organisasi advokat yang berwenang mengatur profesi advokat serta mengawasi pelaksanaan kode etik profesi.

* 1. **Tujuan Penegakan Hukum**

Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Melalui penegakan hukum, setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang teratur dan harmonis. Penegakan hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang baik oleh masyarakat maupun oleh penguasa.

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur jenis-jenis hukuman, termasuk hukuman pokok dan tambahan, yang bertujuan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar hukum.

Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami konsekuensi dari suatu pelanggaran. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, masyarakat akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Pada akhirnya, penerapan hukum yang baik akan menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Tujuan penegakan hukum selanjutnya adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Penegakan hukum harus mampu memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan dalam setiap proses penegakan hukum. Keadilan yang dihasilkan dari penegakan hukum akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Stabilitas politik akan tercipta ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Stabilitas ekonomi terjaga karena adanya kepastian hukum yang mendukung kegiatan bisnis dan investasi. Stabilitas sosial terwujud karena masyarakat merasa aman dan terlindungi oleh hukum. Kondisi yang stabil ini sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tertib hukum akan lebih mudah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Penegakan hukum yang baik akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya, penegakan hukum berkontribusi pada terwujudnya cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

##### Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

* 1. **Definisi Hukum Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Fidusia juga berlaku untuk benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Pengertian fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor lainnya. Sistem pendaftaran dalam jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. (Bahsan, 2007)

Dasar hukum utama jaminan fidusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai ketentuan dan pelaksanaan jaminan fidusia. Peraturan pelaksana lainnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dasar hukum jaminan fidusia juga mencakup Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Seluruh regulasi ini membentuk kerangka hukum yang kuat untuk pelaksanaan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan undang-undang. Pendaftaran dilakukan melalui sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Proses pendaftaran akan menghasilkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat tersebut memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi jika debitor cidera janji. (Effendi, 2007)

Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud. Termasuk dalam kategori ini adalah kendaraan bermotor, mesin-mesin, stok barang dagangan, dan piutang. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya secara hukum. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (Harefa, 2020)

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (cidera janji) melalui tiga mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia. Kedua, penerima fidusia memiliki wewenang untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan atas utang debitur. Ketiga, objek jaminan dapat dijual secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, dengan syarat bahwa metode ini dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan eksekusi ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur bahwa dalam hal pemberi fidusia cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum ataupun secara di bawah tangan dengan kesepakatan kedua belah pihak, asalkan penjualan tersebut menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku guna menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan memastikan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.

* 1. **Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia**

Subjek jaminan fidusia terdiri dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Pemberi fidusia memiliki kewenangan untuk mengalihkan hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia harus cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak kepemilikan. (Harsono, 2008)

Pemberi fidusia bisa merupakan debitor sendiri atau pihak ketiga yang memiliki hak atas benda jaminan. Dalam praktiknya, penerima fidusia umumnya adalah bank atau lembaga pembiayaan. Penerima fidusia memiliki hak preferensi yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang. Hak preferensi ini berlaku sejak tanggal pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kedudukan yang diutamakan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia. (J. Satrio, 1999)

Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak berwujud mencakup kendaraan bermotor, mesin-mesin produksi, stok barang dagangan, dan peralatan. Benda tidak berwujud termasuk piutang, hak atas kekayaan intelektual, dan hak tagih. Objek jaminan fidusia juga dapat berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Setiap uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diidentifikasikan dengan jelas dalam akta jaminan fidusia. (Lilik Mulyadi, 2007)

Objek jaminan fidusia harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dijaminkan. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. Benda yang dijadikan jaminan fidusia harus memiliki nilai ekonomis. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus dapat ditentukan jenisnya dan dapat dinilai dengan uang. Objek jaminan fidusia juga harus dijelaskan mengenai data yang menjelaskan karakteristik benda tersebut.

Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga termasuk dalam jaminan fidusia. Klaim asuransi untuk benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga merupakan objek jaminan fidusia. Benda yang diperoleh sebagai hasil dari benda yang dijaminkan juga menjadi objek jaminan fidusia. Benda persediaan (inventory) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan, maka fidusia tetap mengikuti benda tersebut kemanapun benda itu berada. (Munir Fuady, 2003)

* 1. **Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pendaftaran jaminan fidusia adalah proses administrasi hukum yang dilakukan untuk memberikan pengakuan formal terhadap perjanjian fidusia antara pemberi dan penerima fidusia. Jaminan fidusia sendiri merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda sebagai jaminan utang, meskipun penguasaan fisiknya tetap berada pada pemberi fidusia. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terkait, terutama penerima fidusia, atas benda yang dijadikan objek jaminan. Selain itu, pendaftaran fidusia juga berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari terkait status kepemilikan benda. Melalui pendaftaran, hak penerima fidusia memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan diakui secara resmi. (Munir Fuady, 2007)

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran oleh pemberi atau penerima fidusia melalui sistem online yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pemohon wajib melampirkan dokumen-dokumen penting, seperti perjanjian fidusia, data objek jaminan, dan data para pihak. Setelah dokumen lengkap, petugas akan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang diajukan. Jika permohonan disetujui, penerima fidusia akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti pendaftaran yang sah. (Nur Rohman, 2019)

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan berbagai manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Bagi penerima fidusia, pendaftaran ini memberikan kepastian hukum dan memastikan hak prioritas atas objek jaminan jika terjadi wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sementara itu, bagi pemberi fidusia, pendaftaran ini memungkinkan mereka tetap dapat menggunakan objek jaminan selama perjanjian berlangsung, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 undang-undang yang sama. Selain itu, pendaftaran fidusia juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan mencegah pengalihan objek jaminan secara ilegal. Dengan adanya pendaftaran fidusia, baik pemberi, penerima, maupun pihak ketiga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan kepastian dalam menjalankan perjanjian fidusia (Rahmat, A, 2016)

Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini dapat mengakibatkan penerima fidusia kehilangan hak prioritas atas benda jaminan dalam kasus sengketa atau kepailitan pemberi fidusia. Selain itu, tidak adanya pendaftaran juga dapat mempersulit proses eksekusi benda jaminan jika terjadi wanprestasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran fidusia merupakan syarat mutlak agar perjanjian fidusia dapat diakui secara sah. Oleh karena itu, pendaftaran menjadi langkah krusial untuk memastikan perjanjian fidusia memiliki kekuatan hukum yang jelas. (Salim, 2008)

Meskipun sistem pendaftaran fidusia telah diterapkan secara elektronik, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran ini. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan sistem online juga dapat memperlambat proses pendaftaran. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, termasuk memberikan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat dan penyederhanaan proses administrasi. Upaya lainnya adalah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian fidusia untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak.

* 1. **Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi jaminan fidusia adalah proses hukum yang dilakukan oleh penerima fidusia untuk mengambil alih benda yang menjadi objek jaminan jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Eksekusi ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak penerima fidusia sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hak penerima fidusia atas benda jaminan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi fidusia dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. (Soeroso, 2006)

Prosedur eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti penjualan benda jaminan secara lelang, penjualan di bawah tangan, atau pengambilalihan langsung oleh penerima fidusia. Cara yang paling umum adalah melalui penjualan lelang, yang dilakukan sesuai aturan hukum untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi kedua pihak. Sebelum eksekusi dilakukan, penerima fidusia wajib memberikan pemberitahuan kepada pemberi fidusia. Jika pemberi fidusia tidak menyelesaikan kewajibannya setelah pemberitahuan, eksekusi dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa prosedur ini dilakukan secara sah dan transparan untuk menghindari potensi sengketa. (Subekti, 2008)

Dalam proses eksekusi, penerima fidusia memiliki hak untuk memperoleh hasil penjualan benda jaminan guna melunasi kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemberi fidusia. Namun, penerima fidusia juga berkewajiban untuk memperhatikan hak pemberi fidusia, seperti hak atas sisa hasil penjualan setelah utang dilunasi. Sebaliknya, pemberi fidusia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian fidusia, termasuk menyerahkan benda jaminan untuk dieksekusi. Hak pemberi fidusia untuk mempertahankan benda tersebut hanya berlaku jika kewajiban telah dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dalam proses eksekusi. (Suhartono, 2009)

Meskipun aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia sudah jelas, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah adanya perlawanan dari pemberi fidusia yang enggan menyerahkan benda jaminan. Selain itu, keterbatasan akses ke layanan lelang resmi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur eksekusi juga menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, konflik dengan pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas benda jaminan juga dapat memperumit proses. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan upaya penyelesaian sengketa secara damai sebelum mengambil langkah hukum. (Tjiptono, 2016)

Kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia sangat penting untuk melindungi hak-hak penerima fidusia dan memastikan pelaksanaan yang adil. Pemerintah melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan dasar hukum yang jelas, termasuk kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia. Namun, penerapan hukum yang konsisten dan dukungan aparat penegak hukum menjadi faktor kunci untuk keberhasilan eksekusi. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme fidusia. Dengan adanya kepastian hukum, proses eksekusi fidusia dapat berjalan lebih lancar dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

* 1. **Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia**

Penerima fidusia memiliki hak utama untuk memperoleh kepastian atas pelunasan utang yang dijamin oleh benda fidusia. Dalam hal pemberi fidusia gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan. Hak penerima fidusia diakui secara hukum dan dilindungi melalui sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, penerima fidusia juga memiliki hak prioritas atas hasil penjualan benda jaminan dibandingkan pihak lain. Hak ini memberikan perlindungan hukum yang kuat, sehingga risiko kehilangan hak atas benda jaminan dapat diminimalisasi. (Zainuddin, 2019)

Sebagai pihak yang menerima jaminan, penerima fidusia berkewajiban untuk menjaga keabsahan perjanjian fidusia yang telah disepakati. Salah satu kewajibannya adalah mendaftarkan perjanjian fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat resmi. Penerima fidusia juga harus menghormati hak pemberi fidusia selama masa perjanjian, termasuk tidak mengambil alih benda jaminan tanpa dasar hukum yang sah. Jika terjadi eksekusi, penerima fidusia wajib melaksanakan proses tersebut sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan memenuhi kewajiban ini, penerima fidusia menunjukkan itikad baik dalam hubungan hukum dengan pemberi fidusia. (Yahya Harahap, 2009)

Pemberi fidusia memiliki hak untuk tetap menguasai dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan selama tidak terjadi wanprestasi. Hak ini memungkinkan pemberi fidusia untuk terus menjalankan usahanya atau kegiatan sehari-hari meskipun benda tersebut menjadi jaminan. Selain itu, pemberi fidusia juga berhak atas sisa hasil penjualan benda jaminan setelah utang kepada penerima fidusia dilunasi. Dalam hal terjadi perselisihan, pemberi fidusia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Hak-hak ini memberikan keseimbangan dalam hubungan antara pemberi dan penerima fidusia. (Yudha Bhakti, 2012)

Pemberi fidusia memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kewajiban utang yang dijamin sesuai perjanjian fidusia. Kewajiban lainnya adalah menyerahkan benda yang dijadikan jaminan secara hukum, meskipun benda tersebut tetap dalam penguasaan fisiknya. Pemberi fidusia juga wajib menjaga benda jaminan agar tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalihkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia. Jika pemberi fidusia melanggar kewajiban ini, penerima fidusia memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau melakukan eksekusi. Dengan memenuhi kewajiban ini, pemberi fidusia menunjukkan tanggung jawabnya terhadap perjanjian fidusia.

Hubungan antara pemberi dan penerima fidusia didasarkan pada prinsip keseimbangan hak dan kewajiban untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Penerima fidusia memiliki hak atas jaminan pembayaran utang, tetapi harus menghormati hak pemberi fidusia untuk tetap menggunakan benda jaminan. Sebaliknya, pemberi fidusia memiliki hak untuk menguasai benda jaminan, tetapi wajib memenuhi kewajibannya agar benda tersebut tidak dieksekusi. Dengan saling memenuhi hak dan kewajiban, hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian fidusia dapat berjalan harmonis. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak serta menciptakan kepercayaan dalam perjanjian jaminan fidusia.

##### Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia

* 1. **Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menguasai atau mengambil barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Perbedaan penggelapan dengan pencurian terletak pada posisi awal pelaku yang sudah memiliki akses atau kepercayaan atas barang tersebut. Tindakan ini sering terjadi dalam konteks hubungan kepercayaan, seperti antara pemilik barang dan pihak yang memegang barang tersebut. Dengan demikian, penggelapan merupakan pelanggaran atas hak kepemilikan orang lain yang dilindungi oleh hukum. (Adami Chazawi, 2005)

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, harus terpenuhi beberapa unsur, baik secara objektif maupun subjektif. Unsur objektif meliputi keberadaan barang yang dimiliki oleh orang lain, serta pelaku memiliki penguasaan barang tersebut berdasarkan kepercayaan. Sementara itu, unsur subjektif mencakup adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pelaku biasanya menggunakan cara-cara seperti menyembunyikan barang, mengubah status barang, atau menjual barang tanpa izin pemiliknya. Unsur-unsur ini harus dibuktikan dalam proses hukum agar perbuatan tersebut dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penggelapan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada hubungan dan situasi antara pelaku dan korban. Salah satu jenis penggelapan adalah penggelapan dalam hubungan kerja, di mana pelaku menggunakan barang milik perusahaan atau majikan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Ada pula penggelapan dalam lingkup keluarga atau teman, yang sering kali terjadi karena faktor kepercayaan yang disalahgunakan. Selain itu, penggelapan juga dapat melibatkan aset-aset berharga, seperti kendaraan, uang, atau dokumen penting. Meskipun jenisnya beragam, esensi dari tindak pidana ini tetap sama, yaitu pelanggaran atas hak milik orang lain. (Lilik Mulyadi, 2007)

Pelaku penggelapan dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, denda, atau keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP. Hukuman maksimal untuk tindak pidana penggelapan adalah empat tahun penjara, tergantung pada beratnya kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Penggelapan sering kali menimbulkan kerugian materiil yang signifikan, serta merusak hubungan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas.

Pencegahan penggelapan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap barang atau aset yang dipercayakan kepada orang lain. Salah satu caranya adalah dengan membuat perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait barang tersebut. Selain itu, penting juga untuk membangun sistem audit atau pemantauan yang transparan, terutama dalam konteks perusahaan atau organisasi. Edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari penggelapan juga dapat membantu mencegah tindak pidana ini. Dengan langkah-langkah ini, risiko terjadinya penggelapan dapat diminimalkan, dan kepercayaan dalam hubungan sosial maupun bisnis dapat tetap terjaga.

* 1. **Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Unsur objektif tindak pidana penggelapan melibatkan keberadaan benda atau barang yang menjadi objek kejahatan. Barang tersebut harus merupakan milik orang lain yang penguasaannya telah dipercayakan kepada pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepercayaan ini dapat muncul dari hubungan hukum, seperti perjanjian atau kontrak, atau melalui hubungan kepercayaan pribadi. Pelaku kemudian menyalahgunakan penguasaan tersebut dengan cara menyembunyikan, mengalihkan, atau menggunakan barang itu untuk kepentingan sendiri tanpa izin pemiliknya. Unsur ini menjadi dasar untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum. (Citra, 2022)

Unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan melibatkan niat atau kesengajaan pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pelaku memiliki kehendak untuk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya demi keuntungan pribadi. Kesengajaan ini dapat dibuktikan melalui tindakan atau pernyataan pelaku yang menunjukkan niat untuk menguasai barang tersebut. Misalnya, pelaku menjual barang milik orang lain tanpa izin atau menyembunyikannya agar tidak dikembalikan. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku bukanlah hasil dari kelalaian, melainkan perbuatan yang disengaja.

Dalam tindak pidana penggelapan, barang yang menjadi objek harus merupakan milik orang lain yang secara hukum tidak beralih kepemilikan kepada pelaku. Barang tersebut tetap berada di bawah kepemilikan sah pemiliknya meskipun telah diserahkan kepada pelaku untuk dikuasai sementara. Contoh barang yang sering menjadi objek penggelapan adalah uang, kendaraan, atau dokumen berharga yang dipinjamkan atau dipercayakan. Jika barang tersebut dimanfaatkan tanpa izin untuk keuntungan pribadi, maka pelaku dianggap melawan hukum. Unsur ini mempertegas perlindungan hukum atas hak milik individu atau badan hukum. (Junaidi, 2021)

Salah satu elemen penting dalam penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepada pelaku. Kepercayaan ini biasanya muncul dari hubungan kerja, persahabatan, keluarga, atau kontrak hukum. Pelaku menggunakan akses yang diperoleh atas dasar kepercayaan untuk mengambil atau menguasai barang secara melawan hukum. Misalnya, seorang pegawai yang mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Penyalahgunaan kepercayaan ini menjadi faktor yang membedakan penggelapan dari pencurian, di mana pencurian tidak melibatkan unsur kepercayaan sebelumnya.

Tindak pidana penggelapan juga harus memenuhi unsur melawan hukum, yaitu tindakan pelaku bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Meskipun pelaku memiliki penguasaan atas barang, tindakan untuk mengambil, menyembunyikan, atau menjual barang tersebut tanpa izin melanggar hukum. Unsur ini menekankan bahwa perbuatan penggelapan tidak hanya melanggar kepercayaan, tetapi juga melanggar aturan hukum yang melindungi hak kepemilikan. Dalam konteks hukum pidana, unsur ini menjadi dasar untuk menuntut pelaku secara hukum. Dengan adanya unsur melawan hukum, tindak penggelapan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

* 1. **Bentuk Penggelapan Objek Jaminan Fidusia**

Penggelapan objek jaminan fidusia adalah tindak pidana di mana pemberi fidusia menyalahgunakan atau mengalihkan benda yang dijadikan jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia. Objek jaminan fidusia, seperti kendaraan, peralatan, atau barang dagangan, tetap berada dalam penguasaan fisik pemberi fidusia selama masa perjanjian berlangsung. Namun, jika benda tersebut dijual, disewakan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin penerima fidusia, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penggelapan. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindakan ini melanggar hak penerima fidusia dan merusak prinsip kepercayaan dalam perjanjian fidusia. (Rifai, 2020)

Salah satu bentuk paling umum dari penggelapan objek jaminan fidusia adalah penjualan benda jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia. Misalnya, pemberi fidusia yang menjual kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit kepada pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini melanggar perjanjian fidusia karena merusak hak penerima fidusia atas benda tersebut. Penjualan tanpa izin sering kali dilakukan secara diam-diam atau melalui pihak ketiga untuk menyembunyikan jejak transaksi. Hal ini tidak hanya merugikan penerima fidusia tetapi juga dapat menciptakan konflik hukum dengan pihak ketiga yang membeli benda tersebut.

Bentuk lain dari penggelapan objek jaminan fidusia adalah menyewakan benda jaminan tanpa izin penerima fidusia. Contoh kasusnya adalah pemberi fidusia yang menyewakan alat berat yang dijadikan jaminan kredit kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Tindakan ini melanggar perjanjian fidusia karena mengalihkan penggunaan benda jaminan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penerima fidusia. Penyewaan ilegal ini dapat memperburuk kerugian penerima fidusia jika benda tersebut rusak atau tidak dapat dilacak. Selain itu, tindakan ini juga menciptakan risiko hukum bagi pihak yang menyewa benda tersebut.

Penggelapan objek fidusia juga dapat terjadi melalui perubahan kondisi benda jaminan, seperti mengganti nomor rangka kendaraan atau memodifikasi barang sehingga sulit dikenali. Modifikasi ini sering dilakukan untuk menghindari pelacakan oleh penerima fidusia jika terjadi wanprestasi. Perubahan kondisi benda jaminan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang serius karena menghalangi eksekusi fidusia. Tindakan ini juga dapat digunakan untuk mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga secara ilegal. Dengan merubah identitas benda, pemberi fidusia mencoba untuk menghindari tanggung jawab hukum yang melekat pada perjanjian fidusia.

Tindakan penggelapan objek jaminan fidusia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Pelaku dapat diancam hukuman penjara hingga empat tahun atau denda yang ditentukan oleh pengadilan. Untuk mencegah penggelapan, penerima fidusia perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap benda jaminan, termasuk mencantumkan klausul perlindungan dalam perjanjian. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem elektronik untuk melacak dan memantau status objek jaminan fidusia. Dengan langkah-langkah ini, risiko penggelapan dapat diminimalkan, dan hak penerima fidusia dapat terlindungi secara hukum.

* 1. **Modus Operandi Penggelapan Jaminan Fidusia**

Modus operandi tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia merujuk pada cara atau strategi yang digunakan oleh pelaku untuk menyalahgunakan benda yang dijadikan jaminan tanpa izin penerima fidusia. Modus ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, mengingat pemberi fidusia biasanya tetap menguasai fisik objek jaminan. Tindakan penggelapan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penjualan, penyewaan, hingga pengubahan identitas benda jaminan. Pelaku biasanya memanfaatkan celah dalam pengawasan penerima fidusia atau kurangnya perlindungan dalam perjanjian fidusia. Dengan menggunakan berbagai modus ini, pelaku berupaya mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan atau izin penerima fidusia. Pelaku biasanya menjual barang seperti kendaraan bermotor atau alat berat kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah. Untuk menyembunyikan tindakan tersebut, pelaku sering kali menghindari pencatatan resmi atau menggunakan dokumen palsu. Modus ini merugikan penerima fidusia karena kehilangan haknya atas benda jaminan dan menciptakan potensi sengketa hukum dengan pembeli yang tidak mengetahui status fidusia benda tersebut. Penjualan ilegal ini menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan celah kepercayaan dalam sistem fidusia.

Modus lain yang sering dilakukan adalah menyewakan objek jaminan fidusia, seperti alat berat atau kendaraan, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penerima fidusia. Pelaku biasanya memanfaatkan benda jaminan untuk mendapatkan keuntungan tambahan dengan cara menyewakannya selama periode perjanjian fidusia. Dalam banyak kasus, benda yang disewakan tersebut sulit dilacak atau rusak selama masa sewa, sehingga mengakibatkan kerugian tambahan bagi penerima fidusia. Modus ini sering terjadi dalam industri yang melibatkan aset bergerak bernilai tinggi, seperti kendaraan komersial atau peralatan konstruksi. Dengan menyewakan benda jaminan, pelaku melanggar prinsip kepercayaan dan hukum yang melekat dalam perjanjian fidusia.

Beberapa pelaku tindak pidana penggelapan objek fidusia menggunakan modus dengan mengubah identitas benda jaminan. Modifikasi ini dapat mencakup mengganti nomor rangka atau mesin kendaraan, mengganti warna, atau memalsukan dokumen kepemilikan. Modus ini dilakukan untuk menghindari pelacakan oleh penerima fidusia jika terjadi wanprestasi. Dengan mengubah identitas benda, pelaku dapat menjual atau memanfaatkan benda tersebut tanpa diketahui oleh pihak yang berhak. Modus ini menjadi tantangan besar bagi penerima fidusia karena membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk menemukan benda jaminan.

Modus lain yang sering digunakan adalah memalsukan dokumen terkait benda jaminan, seperti sertifikat kepemilikan atau dokumen fidusia. Pelaku memanfaatkan dokumen palsu ini untuk mengklaim bahwa benda tersebut bebas dari perjanjian fidusia atau sudah menjadi miliknya sepenuhnya. Dokumen palsu ini kemudian digunakan untuk menjual, menyewakan, atau menjaminkan ulang benda tersebut kepada pihak lain. Modus ini tidak hanya merugikan penerima fidusia tetapi juga menimbulkan dampak hukum bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan pelaku. Untuk mencegah modus ini, penting bagi penerima fidusia untuk memastikan keabsahan dokumen dan menggunakan sistem pencatatan elektronik yang terintegrasi untuk melacak status benda jaminan.

* 1. **Sanksi Hukum Penggelapan Objek Jaminan Fidusia**

Tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur hukuman maksimal empat tahun penjara bagi pelaku yang terbukti dengan sengaja menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak penerima fidusia atas benda yang dijadikan jaminan. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai denda, meskipun besarnya tergantung pada pertimbangan hakim dalam proses peradilan. Ketentuan pidana ini berlaku untuk kasus penggelapan yang dilakukan secara langsung maupun melalui berbagai modus operandi.

Selain sanksi dalam KUHP, tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia juga diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menyebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menyewakan, atau mengubah benda jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Jika pemberi fidusia melanggar ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp50 juta. Aturan ini memberikan perlindungan tambahan kepada penerima fidusia agar hak-haknya atas benda jaminan tetap terjaga. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan pemberi fidusia tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan.

Selain sanksi pidana, tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia juga dapat menimbulkan konsekuensi perdata. Penerima fidusia berhak untuk mengajukan gugatan perdata kepada pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggelapan benda jaminan. Dalam konteks perdata, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan benda yang digelapkan atau memberikan kompensasi yang setara dengan nilai benda tersebut. Sanksi perdata ini menjadi instrumen tambahan untuk melindungi hak-hak penerima fidusia dari tindakan yang merugikan.

Dalam beberapa kasus, penggelapan objek jaminan fidusia juga dapat dikenai sanksi administratif, terutama jika pelaku adalah badan hukum atau pihak yang memiliki tanggung jawab profesional. Misalnya, lembaga keuangan yang terlibat dalam penggelapan dapat dikenai pencabutan izin operasional atau denda administratif oleh otoritas yang berwenang. Sanksi administratif ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem fidusia dan mencegah pelanggaran yang berulang. Selain itu, penerapan sanksi administratif juga dapat memberikan perlindungan tambahan kepada pihak-pihak yang dirugikan. Langkah ini memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

Penegakan sanksi hukum terhadap tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar memberikan keadilan bagi semua pihak. Di sisi lain, penerima fidusia juga perlu proaktif dalam melaporkan dan mengumpulkan bukti atas tindak penggelapan. Upaya penegakan hukum yang konsisten akan memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi pelanggaran serupa di masa depan. Dengan penegakan hukum yang tegas, kepercayaan terhadap sistem fidusia dapat tetap terjaga.

##### Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

* 1. **Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum perdata, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perbuatan seseorang yang merugikan pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap kesusilaan, kepatutan, dan norma sosial. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran terhadap hak atau kepentingan orang lain yang diakui oleh hukum.

Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan, bertentangan dengan hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif, seperti mencuri, atau tindakan pasif, seperti tidak memenuhi kewajiban yang diatur oleh hukum. Selain itu, perbuatan tersebut harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Unsur kerugian harus dibuktikan, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Hubungan kausalitas diperlukan untuk menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi adalah akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum lebih ditekankan pada kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat pelanggaran hak. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti rugi. Sementara itu, dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum biasanya merujuk pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Contohnya adalah tindak pidana seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada tujuan hukum: hukum perdata berfokus pada pemulihan hak, sedangkan hukum pidana bertujuan untuk menghukum pelaku dan melindungi kepentingan umum.

Selain dalam hukum positif, konsep perbuatan melawan hukum juga diakui dalam hukum adat. Dalam hukum adat, tindakan yang melawan hukum biasanya merujuk pada pelanggaran terhadap norma adat atau nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Contohnya adalah pelanggaran terhadap aturan tanah ulayat atau tindakan yang merusak harmoni dalam masyarakat adat. Sanksi yang diberikan dalam hukum adat bersifat korektif dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam komunitas. Meski berbeda dalam bentuk dan prosedur, prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum adat sejalan dengan tujuan hukum formal, yaitu melindungi hak dan kepentingan masyarakat.

Perbuatan melawan hukum memiliki implikasi hukum yang serius, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, pelaku perbuatan melawan hukum dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian atau mengembalikan kondisi seperti semula. Sementara itu, dalam hukum pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga dapat merusak reputasi, hubungan sosial, atau kredibilitas pelaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku agar terhindar dari konsekuensi negatif tersebut.

* 1. **Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Unsur pertama dari perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik secara aktif maupun pasif. Tindakan aktif merujuk pada perilaku nyata seperti mencuri, menipu, atau merusak barang milik orang lain. Sebaliknya, tindakan pasif adalah kelalaian atau kegagalan memenuhi kewajiban hukum, misalnya tidak membayar utang sesuai perjanjian. Perbuatan ini harus dapat diidentifikasi secara jelas sebagai suatu tindakan yang menyebabkan dampak tertentu. Tanpa adanya perbuatan, suatu kasus tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis, perbuatan melawan hukum mencakup pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan. Sementara itu, dalam hukum tidak tertulis, perbuatan melawan hukum dapat mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, atau adat istiadat. Misalnya, menghina seseorang mungkin tidak selalu diatur secara spesifik dalam undang-undang, tetapi dapat dianggap melanggar norma kesusilaan. Dengan demikian, pelanggaran norma ini menjadi salah satu ciri penting dari unsur perbuatan melawan hukum.

Unsur berikutnya adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan tersebut. Kerugian ini dapat bersifat materiil, seperti kehilangan uang atau barang, maupun immateriil, seperti rusaknya nama baik atau trauma psikologis. Dalam konteks hukum perdata, kerugian merupakan elemen penting karena tujuan utama dari gugatan adalah mendapatkan ganti rugi. Tanpa adanya kerugian yang nyata, maka sulit untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi syarat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan harus dapat menunjukkan bukti bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi.

Unsur hubungan kausalitas adalah kaitan langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Artinya, kerugian yang dialami harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Misalnya, jika seseorang merusak kendaraan orang lain, kerugian berupa biaya perbaikan kendaraan tersebut harus dapat dikaitkan langsung dengan tindakan pelaku. Jika hubungan sebab-akibat ini tidak dapat dibuktikan, maka gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan. Hubungan kausalitas ini menjadi dasar penting untuk menentukan tanggung jawab hukum pelaku.

Unsur terakhir adalah adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan dapat berupa niat jahat (dolus) atau kelalaian (culpa) dalam menjalankan kewajiban hukum. Dalam beberapa kasus, kesalahan juga dapat bersifat tidak langsung, seperti tindakan ceroboh yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tanpa adanya kesalahan atau kelalaian, pelaku mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Unsur ini penting untuk membedakan perbuatan melawan hukum dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau di luar kendali pelaku.

* 1. **Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jaminan Fidusia**

Perbuatan melawan hukum dalam jaminan fidusia dapat terjadi dari pihak pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Pemberi fidusia yang dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia yang memberikan keterangan palsu terkait objek jaminan fidusia juga melakukan perbuatan melawan hukum. Menggelapkan atau menjual objek jaminan fidusia tanpa hak juga termasuk perbuatan melawan hukum.

Penerima fidusia yang melakukan eksekusi tidak sesuai prosedur hukum termasuk perbuatan melawan hukum. Tindakan mengambil paksa objek jaminan fidusia tanpa melalui prosedur eksekusi yang sah adalah illegal. Penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia juga melanggar ketentuan undang-undang. Eksekusi yang dilakukan tanpa sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan eksekutorial adalah perbuatan melawan hukum. Penerima fidusia yang melakukan intimidasi atau kekerasan dalam proses eksekusi dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penjualan objek jaminan di bawah tangan tanpa persetujuan pemberi fidusia melanggar ketentuan undang-undang. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi jika penerima fidusia tidak memberikan sisa hasil eksekusi kepada pemberi fidusia. Pemalsuan dokumen dalam proses pendaftaran jaminan fidusia termasuk perbuatan melawan hukum. Kedua belah pihak harus mentaati prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari perbuatan melawan hukum.

Sanksi terhadap perbuatan melawan hukum dalam jaminan fidusia dapat berupa pidana dan perdata. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda sesuai ketentuan undang-undang. Gugatan perdata dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan batalnya perjanjian jaminan fidusia. Sanksi administratif juga dapat dikenakan berupa pencabutan izin usaha bagi lembaga pembiayaan yang melanggar ketentuan.

Pencegahan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan melalui pemahaman yang baik tentang ketentuan jaminan fidusia. Para pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian jaminan fidusia. Notaris berperan penting dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak tentang prosedur yang benar. Pengawasan dari otoritas terkait diperlukan untuk mencegah praktik-praktik melawan hukum. Edukasi kepada masyarakat tentang jaminan fidusia juga penting untuk mencegah pelanggaran hukum.

* 1. **Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi bagi pelaku. Ganti rugi dapat meliputi kerugian materiil yang secara nyata diderita oleh korban. Kerugian immateriil seperti tekanan mental atau kehilangan kesempatan juga dapat dituntut penggantiannya. Besaran ganti rugi harus dapat dibuktikan dan dihitung secara rasional sesuai kerugian yang terjadi. Pengadilan akan menentukan besaran ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan pembatalan perbuatan atau perjanjian yang dilakukan. Perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pembatalan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Para pihak harus mengembalikan prestasi yang telah diterima jika perjanjian dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaku perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Ancaman pidana dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya sesuai ketentuan undang-undang. Sanksi pidana dijatuhkan melalui proses peradilan pidana yang independen dari proses perdata. Putusan pidana tidak menghapuskan kewajiban ganti rugi secara perdata. Pelaku tetap dapat dituntut secara perdata meskipun telah dijatuhi sanksi pidana.

Perbuatan melawan hukum juga dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi pelaku. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin usaha atau larangan menjalankan profesi tertentu. Otoritas yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa. Sanksi ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana dan perdata.

Akibat hukum yang paling jauh adalah kemungkinan pemulihan nama baik korban perbuatan melawan hukum. Pelaku dapat diwajibkan untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui media massa. Putusan pengadilan yang menyatakan terjadinya perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk memulihkan reputasi korban. Korban berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik jika perbuatan melawan hukum telah mencemarkan nama baiknya. Pemulihan nama baik menjadi bagian dari upaya mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

* 1. **Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pelaku. Ganti rugi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Besaran ganti rugi harus dapat dibuktikan dan dihitung secara nyata berdasarkan kerugian yang terjadi. Korban harus dapat membuktikan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita. Pengadilan akan menentukan besaran ganti rugi berdasarkan pertimbangan yang adil dan rasional.

Ganti rugi dapat berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga yang diderita korban. Biaya adalah segala pengeluaran yang telah dikeluarkan korban akibat perbuatan melawan hukum. Rugi adalah berkurangnya nilai kekayaan korban akibat perbuatan tersebut. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Ketiga komponen ini harus dapat dibuktikan secara konkret dalam persidangan.

Ganti rugi immateriil juga dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum. Kerugian immateriil mencakup tekanan mental, penderitaan psikis, atau kehilangan kesempatan yang dialami korban. Penilaian terhadap kerugian immateriil lebih sulit karena sifatnya yang tidak berwujud. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi immateriil berdasarkan rasa keadilan. Penentuan besaran ganti rugi immateriil mempertimbangkan berbagai faktor termasuk status sosial dan kondisi korban.

Pembayaran ganti rugi harus dilakukan sekaligus kecuali ditentukan lain oleh pengadilan. Pelaku dapat diberikan kesempatan untuk mencicil pembayaran ganti rugi berdasarkan pertimbangan tertentu. Jangka waktu pembayaran ganti rugi harus ditentukan secara jelas dalam putusan pengadilan. Korban berhak mengajukan eksekusi jika pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi. Eksekusi dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku untuk memenuhi ganti rugi.

Dalam kasus tertentu, ganti rugi dapat ditanggung bersama oleh beberapa pihak yang terlibat. Tanggung jawab renteng dapat diterapkan jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pembagian beban ganti rugi ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan masing-masing pihak. Korban dapat menuntut ganti rugi kepada salah satu atau semua pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang telah membayar ganti rugi memiliki hak untuk menuntut kembali kepada pihak lain yang turut bertanggung jawab.